

RENJA

TAHUN 2026

PEMERINTAH KOTA
TANGERANG SELATAN

BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

R. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) OPD sehingga penyusunan Renja OPD berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Dengan memperhatikan aturan yang berlaku, penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 dilaksanakan melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Sesuai pendekatan dimaksud, maka RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 ini merupakan manifestasi dari berbagai pikiran segenap pemangku kepentingan. Proses penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah, koordinasi antar bidang dan stakeholder yang terkait. RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 ini sendiri telah memperhatikan keterkaitan dan sejalan dengan Rancangan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 - 2029, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 dan Rencana Kerja kementerian/lembaga terkait yang nantinya akan dijabarkan dalam rencana kinerja jangka pendek urusan penanaman modal tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2026. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA OPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, dan program OPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis OPD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA OPD merupakan acuan bagi OPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA–PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) pada tahun 2026;
3. RENJA OPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan OPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Tahun 2004 Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (LNRI Tahun 2007 Nomor 33, TLNRI Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, TLNRI Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (LNRI Tahun 2008 Nomor 188, TLNRI Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2000 Nomor 112, TLNRI Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LNRI Tahun 2020 Nomor 245, TLNRI Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (LNRI Tahun 2004 Nomor 45, TLNRI Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 139, TLNRI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (LNRI Tahun 2006 Nomor 96, TLNRI Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 21, TLNRI Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2019 Nomor 187, TLNRI Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031;

21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 – 2029;
22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu;
24. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2026 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana Kerja Anggarann (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026.
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan.

3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sistematika penyusunan RENJA DPMPTSP Kota Tangerang Selatan tahun 2026 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI DPMPTSP KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP DPMPTSP Kota Tangerang Selatan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Tangerang Selatan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA TANGERANG SELATAN
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA TANGERANG SELATAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMPTSP KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan pada Tahun Lalu menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Setiap program selanjutnya disusun dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung. Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menunaikan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, setiap program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja. Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (*output*). Target capaian kinerja ditetapkan dalam renstra untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam renja.

Hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam renja dan renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tabel 2.1 menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan dan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan sampai dengan tahun 2026.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan dan Pencapaian Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan s.d. Tahun 2025

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Tujuan Meningkatkan Proporsi Investasi Terhadap PDRB		**45%**							
					Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi	**Nilai investasi**	**5,39 Triliun (Rupiah)**	**7,44 Triliun (Rupiah)**	**7,44 Triliun (Rupiah)**	**8,48 Triliun (Rupiah)**	113,97	**8,7 Triliun (Rupiah)**	**6,47 Triliun (Rupiah)**	74,36
					Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non perizinan	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**90,50 Nilai**	**89,05 Nilai**	**89,50 Nilai**	**89,56 Nilai**	100,05	**90,00 Nilai**	**89,51 Nilai**	100,05
2					**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**									
2	**18**				**Bidang Urusan Penanaman Modal**									
2	**18**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah**	60	**N/A tidak ada penilaian LKE PMB digantikan dengan nilai RB Tematik**	58	**N/A tidak ada penilaian LKE PMB digantikan dengan nilai RB Tematik**	0,00	60	**N/A tidak ada penilaian LKE PMB digantikan dengan nilai RB Tematik**	0,00
						Predikat SAKIP	**BB**	**A**	**A**	**A**	100,00	**A**	**A**	100,00
2	**18**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai AKIP**	**84,4**	**87,01**	**84,35**	**89,10**	105,63	**84,40**	**89,10**	105,81
2	18	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Doc	6 Doc	8 Doc	9 Doc	112,50	8 Doc	1 Doc	12,50
2	18	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	2 Doc	2 Doc	1 Doc	2 Doc	100,00	2 Doc	0	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						SKPD								
2	18	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Doc	2 Doc	2 Doc	2 Doc	100,00	2 Doc	1 Doc	100,00
2	18	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Doc	2 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	2 Doc	1 Doc	100,00
2	18	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Lap	10 Lap	11 Lap	11 Lap	100,00	5 Lap	0 Lap	0,00
2	18	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Lap	6 Lap	8 Lap	8 Lap	100,00	5 Lap	0 Lap	0,00
2	18	1	2.01	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	0	0	0	0	1 Doc		
2	18	1	2.01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	1 Data		
2	18	1	2.01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	1 Berita Acara		

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
2	18	1	2.01	11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0	0	0	0	0	3 Dokumen		
2	**18**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Capaian Realisasi Keuangan pertahun**	**94,00%**	**96,14%**	**92%**	**98,57%**	**107,14**	**93%**	**52,49%**	**57,05**
2	18	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Org	59 Org	56 Org	56 Org	100,00	154 Org	56	100,00
2	18	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	10 Doc	10 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	1	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	1 Doc	100,00
2	18	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100,00	1 Lap	0	0,00
2	18	1	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Doc	2 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	6 Lap	6 Lap	12 Lap	12 Lap	100,00	6 Lap	3 Lap	25,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Triwulanan/ Semesteran SKPD								
2	18	1	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	1 Doc	100,00
2	**18**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	**100%**	0	**0,00**
2	18	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	45 Org	60 Org	60 Org	100,00	60 Org	60 Org	100,00
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	35 Org	60 Org	60 Org	100,00	60 Org	60 Org	100,00
2	**18**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100,00	**100%**	50,00	**0,00**
2	18	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00	3 Paket	3 Paket	100,00
2	18	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00	3 Paket	0	0,00
2	18	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00	3 Paket	1 Paket	33,33
2	18	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100,00	6 Paket	0	0,00
2	18	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Doc	3 Doc	3 Doc	3 Doc	100,00	3 Doc	0	0,00
2	18	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	2 Lap	200,00	1 Lap	0	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
2	**18**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Paket**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	18	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0
2	**18**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Waktu Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**100,00**	**1 Tahun**	**0**	**0,00**
2	18	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	0,00	1 Lap	0	0,00
2	18	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100,00	1 Lap	0	0,00
2	18	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100,00	1 Lap	0	0,00
2	18	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100,00	1 Lap	0	0,00
2	**18**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100,00**	**12 Bulan**	**6 Bulan**	**50,00**
2	18	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00	2 Unit	0	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	18	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit	100,00	36 Unit	0	0,00
2	18	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	10 Unit	10 Unit	100,00	10 Unit	3 Unit	30,00
2	18	1	2.08	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	0	0,00
2	**18**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor**	**1860 Investor**	**8791 Investor**	**1785 Investor**	**14873 Investor**	**833,22**	**1860 Investor**	**2908 Investor**	**162,91**
2	**18**	**2**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**1 Doc**	**1 Doc**	**1 Doc**	**1 Doc**	**100,00**	**1 Doc**	**0**	**0,00**
2	18	2	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	2	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusah di Daerah	1 Doc	1 Doc	0	0	0	0	0	0,00
2	18	2	2.01	03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	0	0	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	**18**	**2**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Peta Potensi Investasi**	**1 Lap**	**1 Lap**	**1 Lap**	**1 Lap**	**100,00**	**1 Lap**	**0**	**0,00**
2	18	02	2,02	01	Penyusunan Rencana Umum	Jumlah Peraturan Daerah	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	(Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
2	18	2	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Doc	1 Doc	0	0	0	0	0	0,00
2	18	2	2.02	04	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0	0	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	1 Doc	100,00
2	**18**	**3**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah**	**100%**	**150%**	**100%**	**121%**	**121,00**	**100%**	**79,00%**	**79,00**
2	**18**	**3**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan pameran penanaman modal**	**3 Kali**	**3 Kali**	**2 Kali**	**3 Kali**	**150,00**	**2 Kali**	**1 Kaali**	66,67
2	18	3	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Doc	1 Doc	0	0	0	0	0	0,00
2	18	3	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	18	3	2.01	03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	0	0	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00
2	**18**	**4**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP**	**90%**	**75,54%**	**85%**	**93,31%**	**109,78**	**90%**	**73,47%**	**86,44**
2	**18**	**4**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Presentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,00**	**100%**	**50%**	**50,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	18	4	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6400 Pelaku Usaha	15863 Pelaku Usaha	0	0	0	0	0	0,00
2	18	4	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	5400 Kegiatan Usaha	6953	0	0	0	0	0	0,00
2	18	4	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	260 Org	311 Org	0	0	0	0	0	0,00
2	18	4	2.01	04	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0	0	6200 Pelaku Usaha	17733 Pelaku Usaha	286,02	6300 Pelaku Usaha	3290 Pelaku Usaha	53,06
2	18	4	2.01	05	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0	0	280 Org	522 Pelaku Usaha	186,43	270 Org	0 Org	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	18	4	2.01	06	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	0	0	5200 Kegiatan Usaha	8363 Kegiatan Usaha	160,83	5300 Kegiatan Usaha	1990 Kegiatan Usaha	38,27
2	**18**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Presentase pengendalian terhadap penanaman modal**	**100%**	**57,33%**	**80%**	**92,67%**	**115,84**	**100%**	**65,22%**	**81,53**
2	**18**	**5**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Kegiatan Monev Penanaman Modal**	**4 Lap**	**4 Lap**	**4 Lap**	**4 Lap**	**100,00**	**4 Lap**	**2 Lap**	**50,00**
2	18	5	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Pelaku Usaha	222 Pelaku Usaha	0	0	0	0	0	0,00
2	18	5	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	28 Kegiatan Usaha	305 Kegiatan Usaha	0	0	0	0	0	0,00
2	18	5	2.01	04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0	0	11 Kegiatan Usaha	288 Kegiatan Usaha	2618,18	11 Kegiatan Usaha	0	0,00
2	18	5	2.01	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0	0	301 Pelaku Usaha	359 Pelaku Usaha	119,27	348 Pelaku Usaha	0	0,00
2	18	5	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah	0	0	350 Kegiatan Usaha	469 Kegiatan Usaha	134,00	350 Kegiatan Usaha	0	0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025 Triwulan II	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha								
2	**18**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal**	**100%**	**36,36%**	**76%**	**81,82%**	**107,66**	**100%**	**36,36%**	**47,84**
2	**18**	**6**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah media informasi dan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara Elektronik**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	**100,00**	**1 Jenis**	**0**	**0,00**
2	18	6	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Data dan Informasi	1 Data dan Informasi	0	0	0	0	0	0,00
2	18	6	2.01	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	0	0	1 Doc	1 Doc	100,00	1 Doc	0	0,00

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan pada table 2.1 di atas di jelaskan bahwa program dan kegiatan didasari oleh Peraturan Kementrian dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenkaltur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan pada tahun 2024 dan 2025 program dan kegiatan yang didasari oleh Kepmendagri Nomor 050-5889.

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

   Target output Program Peningkatan Penanaman Modal adalah Jumlah Investor dengan target sebesar 1.785 Investor. Capaian kinerja Jumlah Investor pada tahun 2024 melebihi target yakni sebesar 14.873 Investor atau tercapai sebesar 833,22%. Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.133.715.350,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.127.797.000,-, yang terdistribusi kedalam 2 kegiatan sebagai berikut.

   a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
   b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

   Dari dua kegiatan pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal seluruhnya telah tercapai 100%.

2. Program Promosi Penanaman Modal

   Target output Program Promosi Penanaman Modal adalah Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah dengan target sebesar 100%. Capaian kinerja Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah pada tahun 2024 mencapai target yakni sebesar 150%. Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.932.844.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.927.008.000,-, yang terdistribusi kedalam 1 kegiatan sebagai berikut .

   a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Dari kegiatan tersebut Pencapaian indikatornya mencapai target yang pada tahun 2023 ditargetkan 2 kegiatan pameran promosi penanaman modal dan terealisasi 2 kegiatan pameran promosi penanaman modal atau tercapai 100%. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai memfokuskan strategi promosi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (online). Adapun dampak dari

tidak tercapainya kegiatan ini serta perubahan strategi promosi penanaman modal melalui online adalah:

1. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal melalui kegiatan pameran (Offline) di tahun-tahun kedepan akan berkurang sehingga lebih efektif dan efisien dari segi anggaran.
2. Kegiatan promosi secara online akan terus ditingkatkan sehingga diperlukan dukungan anggaran pada kegiatan:
   a. Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang didalamnya memuat pengumpulan bahan-bahan promosi secara online pada Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
   b. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik yang didalamnya memuat kebutuhan pengembangan sistem Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kebutuhan server dan storagenya.
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

   Target output Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah Presentase Pengendalian terhadap Penanaman Modal dengan target sebesar 80%. Capaian kinerja Presentase Pengendalian terhadap Penanaman Modal pada tahun 2024 mencapai target yakni sebesar 92,67%. Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.457.630.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.446.804.075,-, yang terdistribusi kedalam 1 kegiatan sebagai berikut .

   a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

   Dari kegiatan tersebut Pencapaian indikatornya yang ditargetkan pada tahun 2024 ditargetkan 4 Laporan Kegiatan Monev Penanaman Modal dan terealisasi 4 Laporan Kegiatan Monev Penanaman Modal atau tercapai 100%.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal

   Target output Program Pelayanan Penanaman Modal adalah Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP dengan target sebesar 85%. Capaian kinerja Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP pada tahun 2024 mencapai target yakni sebesar 93,31%, penarikan data dari simponie. Untuk dapat melaksanakan

program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.690.947.750,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.669.364.546,-, yang terdistribusi kedalam 1 kegiatan sebagai berikut .

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Dari kegiatan tersebut Pencapaian indikatornya yang ditargetkan pada tahun 2024 ditargetkan Presentase Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dan terealisasi atau tercapai 100%.

5. Program Pengelolaan Data dan Sitem Informasi Penanaman Modal

Target output Program Pengelolaan Data dan Sitem Informasi Penanaman Modal adalah Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal target sebesar 76%. Capaian kinerja Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal pada tahun 2024 mencapai target yakni sebesar 81,82%. Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.47.810.000,-, yang terdistribusi kedalam 1 kegiatan sebagai berikut .

a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Dari kegiatan tersebut Pencapaian indikatornya yang ditargetkan pada tahun 2024 ditargetkan 1 jenis Jumlah media informasi dan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara Elektronik dan terealisasi 1 jenis atau tercapai 100%.

6. Program Penunjang Urusan Daerah

Target predikat nilai SAKIP grade BB, realisasi pada tahun 2024 mendapatkan grade A, dalam nilai Akip OPD Dpmptsp mendapatkan nilai sebesar 89,10 dan Indikator Nilai PM RB perangkat daerah dari target 58 tidak terealisasi karena tidak ada penilaian LKE PMB digantikan dengan nilai RB Tematik. Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.28.580.180.0752,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.28.186.843.010,- yang terdistribusi kedalam 7 kegiatan sebagai berikut .

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari kegiatan tersebut Pencapaian indikatornya yang ditargetkan pada tahun 2024 tercapai 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dalam melaksanakan tugas DPMPTSP juga menyelenggarakan fungsi fungsi yang harus dilaksanakan adalah melakukan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Pengaduan dan Peningkatan Layanan, serta Pengelolaan Data dan Informasi. Sekretaris dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, dan umum serta mengoordinasikan pelaksanaan administrasi lingkup Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka penjabaran penjelasan ringkas tentang capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan pada renja tahun sebelumnya.

Indikator kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan terletak pada sasaran pembangunan dalam renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang dilaksanakan

dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud. Indikator kinerja pelayanan ini dapat berupa indikator kinerja kunci (IKK) maupun indikator yang dikreasikan guna mengukur tingkat layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan.

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

- Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon II adalah sebagai berikut :
  1. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Indikator Kinerja Utama ***"Nilai investasi PMDN dan PMA"***
  2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kemudahan investasi Indikator Kinerja Utama ***"Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perizinan)"*** & ***"Presentase Ketepatan Waktu Perizinan Sesuai SOP"***
  3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama ***"Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah", "Persentase Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah"*** & ***"Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Yang dimanfaatkan"***
- Indikator Kinerja Individu (IKI) Eselon III / Fungsional Madya adalah sebagai berikut :
  1. Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi
  2. Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha
  3. Realisasi Total terhadap Target Investasi
  4. Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
  5. Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal
  6. Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  7. Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
  8. Persentase Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah
  9. Persentase Pengelolaan Keuangan Dan Aset Perangkat Daerah

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

No.	Indikator	IKK/ Indikator Kinerja Urusan	Target IKU Daerah / Iku Urusan Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi			Catatan Anali
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	*2025	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)		4,42 T (Rp)	4,66 T (Rp)	7,44 T (Rp)	8,4 - 8,7 T (Rp)	8,7 T (Rp)	5,67 T (Rp)	4,65 T (Rp)	7,44 T (Rp)	8,48 T (Rp)	6,47 T (Rp)	7,44 T (Rp)	8,7 T (Rp)	9,39 T (Rp)	Mengacu dala Dokumen RPJMD 2029, RKPD Tahu
2		Nilai Investasi PMDN dan PMA	4,42 T (Rp)	4,66 T (Rp)	7,44 T (Rp)	8,4-8,7 T (Rp)	8,7 T (Rp)	5,67 T (Rp)	4,65 T (Rp)	7,44 T (Rp)	8,48 T (Rp)	6,27 T (Rp)	7,44 T (Rp)	8,7 T (Rp)	9,39 T (Rp)	Mengacu dala Dokumen Renstra 2029, RKPD Tahu
3		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perizinan)	88,5	89,00	89,50	90,00	90,50	88,41	88,59	89,05	89,56	92,28	89,50	90,00	90,10	
4		Presentase Ketepatan Waktu Perizinan Sesuai SOP	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	93,5	93,7	
5		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	89,12	89,14	
6		Persentase Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	100	100	
7		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Yang dimanfaatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1	1	

\# *Realisasi Tahun 2025 Triwulan II*

1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan Masyarakat. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan penanaman modal meliputi:

a. Proses reformasi birokrasi dan percepatan pelayanan perizinan yang belum optimal;
b. Proses reformasi birokrasi dan percepatan pelayanan perizinan yang belum optimal
c. Distribusi investasi yang belum merata antar wilayah
d. Tingginya tingkat persaingan antar daerah dalam menarik investasi
e. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Investasi
f. Terbatasnya ketersediaan lahan
g. Iklim investasi di Kota Tangerang Selatan belum efisien
h. Tingginya biaya operasional dan Kurangnya insentif bagi investor kecil
i. Fluktuasi ekonomi global
j. Dampak lingkungan dari proyek investasi

Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi. Isu strategis yang telah di identifikasi meliputi:

a. Belum optimalnya reformasi birokrasi dan transparansi regulasi perizinan;

b. Pemerataan dan Optimalisasi Distribusi Investasi;
c. Penguatan Infrastruktur dan Tata Ruang Penunjang Investasi;
d. Pengembangan sektor investasi sesuai potensi unggulan daerah;
e. Efisiensi Biaya dan Insentif Investasi;
f. Ketahanan terhadap Risiko Eksternal dan Lingkungan

Salah satu tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu melakukan pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan baik di level provinsi maupun diKabupaten/Kota. Dalam rangka peningkatan sistem pelayanan perizinan Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektornik melalui penerapan Aplikasi *Online Single Submission* (OSS). Penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan perizinan dengan mengurangi proses birokrasi sehingga mempermudah para pelaku usaha untuk mendapatkan izin berusaha di Indonesia.

Digitalisasi sistem pelayanan perizinan melalui penerapan OSS selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang pada akhirnya dapat mendongkrak daya saing Indonesia. Daya saing suatu daerah merupakan hal yang sangat penting bagi investor untuk menentukan keputusan berinvestasi. Investor cenderung akan memilih daerah yang lingkungan bisnis dengan kebijakan yang ramah, sehingga menjadikan investor menanam investasinya dengan risiko yang dapat dikelola dan terkontrol. Sehingga pada akhirnya dengan perbaikan sistem perizinan diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi di Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini dirasa masih belum cukup untuk mewujudkan realisasi penanaman modal sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah daerah terkait sistem OSS baik dalam regulasi maupun sistemnya.

Adapun permasalahan dan isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan antara lain:

1. Birokrasi dan Koordinasi Lintas Instansi
   - Masih adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
   - Koordinasi yang belum optimal antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan.
2. Inkonsistensi Regulasi
   - Perbedaan interpretasi aturan antara pusat dan daerah.
   - Perubahan regulasi yang terlalu cepat dan tanpa transisi memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi investor.
   - Belum adanya kebijakan penguatan kelembagaan DPMPTSP sebagai koordinator untuk menerbitkan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP).
3. Implementasi OSS Berbasis Risiko
   - Masih ditemui kendala teknis pada sistem OSS (*Online Single Submission*) seperti error, sinkronisasi data, dan keterlambatan pemrosesan.
   - Kesiapan SDM di daerah yang belum merata dalam mengoperasikan sistem.
4. Waktu dan Biaya Perizinan
   - Proses perizinan di sektor tertentu masih memerlukan waktu lama akibat verifikasi teknis dan kelengkapan dokumen.
   - Adanya biaya tidak resmi (*unofficial cost*) yang dapat mengurangi kepercayaan investor.
5. Transparansi dan Kepastian Hukum
   - Minimnya informasi yang jelas dan mudah diakses publik terkait prosedur, persyaratan, dan biaya resmi perizinan.
   - Penyelesaian sengketa perizinan yang lambat, terutama untuk investasi strategis.
6. Standarisasi Pelayanan di Daerah
   - Perbedaan kualitas layanan perizinan antar daerah, terutama di daerah terpencil atau yang belum memiliki infrastruktur memadai.
   - Rendahnya integrasi data perizinan antara pusat dan daerah.

7. Aspek Lingkungan dan Sosial
   - Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dalam investasi.
   - Perlunya keseimbangan antara percepatan izin dan kajian AMDAL yang komprehensif.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Secara umum kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2026 maupun Renstra Tahun 2025-2029 sudah Terakomodir. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan terlampaui.

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi bidang penanaman modal diantaranya :

Tantangan :

1. Kepastian hukum dan regulasi
   - Peraturan yang tumpang tindih antar kementerian/lembaga.
   - Inkonsistensi pelaksanaan antara pusat dan daerah.
2. Kualitas infrastruktur pendukung investasi
   - Keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil atau luar Jawa.
   - Akses logistik yang belum efisien.
3. Birokrasi dan pelayanan perizinan
   - Meskipun OSS (Online Single Submission) sudah berjalan, masih ada kendala teknis, integrasi data, dan koordinasi antar instansi.
4. Ketersediaan SDM terampil
   - Kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri (skill mismatch).
5. Kapasitas UMKM dan industri lokal
   - Daya saing dan kualitas produk lokal yang belum konsisten untuk memenuhi standar global.

Peluang :

1. Perencanaan dan Promosi Investasi
   - Pemanfaatan *big data* dan *investment intelligence* untuk memetakan sektor potensial.
   - Meningkatnya minat investor pada sektor hijau, digital, dan hilirisasi SDA.
   - Event internasional & pameran dagang sebagai ajang promosi.
2. Pemberian Fasilitas dan Insentif
   - Skema insentif pajak (*tax holiday, tax allowance*, bea masuk nol) yang semakin kompetitif.
   - Pemberian kemudahan perizinan bagi proyek strategis nasional dan sektor prioritas.
3. Perizinan Berusaha
   - Optimalisasi *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko untuk mempercepat proses izin.
   - Digitalisasi penuh layanan perizinan, termasuk integrasi sertifikat lingkungan dan izin teknis.
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   - Pemanfaatan sistem *real-time monitoring* untuk proyek investasi.
   - Kerja sama lintas sektor dalam pengawasan berbasis teknologi (*geo-tagging, drone survey*).
5. Kerja Sama Internasional dan Daerah
   - Perjanjian perdagangan bebas (FTA/CEPA) yang membuka akses pasar baru.
   - Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk promosi investasi terpadu.
6. Pengembangan Iklim Investasi
   - Reformasi regulasi yang lebih pro-investor melalui UU Cipta Kerja.
   - Peningkatan koordinasi pusat-daerah untuk mengurangi hambatan birokrasi.
   - Peningkatan indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*).

7. Mengoptimalkan Mall Pelayanan Publik dalam rangka salah satu langkah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Mendukung Investasi.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Selatan
b. Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tangerang Selatan beserta indikator dan targetnya. DPMPTSP sebagai salah satu OPD yang memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendongrak nilai investasi sesuai dengan visi dan misi Walikota. Karena itu DPMPTSP perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya - upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029.
c. Menggali sektor potensi yang ada di Kota Tangerang Selatan yang mempunyai nilai jual untuk menarik investor untuk berinvestasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Hasil review terhadap Rancangan RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan untuk pelaksanaan Tahun 2026 dapat dijelaskan pada tabel Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Urusan Penanaman Modal				31.084.382.749	Urusan Penanaman Modal				31.992.358.702	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	30.135.354.761	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	29.819.682.634	
			Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	100%				Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	100%		
			Persentase Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	100%				Persentase Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	100%		
			Persentase pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%				Persentase pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%		

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu**	100%	36.086.001	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu**	100%	181.856.580	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.906.681	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	19.446.882	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	760.652	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	15.803.382	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	760.652	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	12.989.991	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	672.710	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	7.901.691	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Dokumen DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.258.511	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	15.572.534	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	7.377.841	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	26.849.354	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.913.685	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	18.203.399	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	1 Dokumen	1.402.710	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	7.901.691	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sektoral Daerah								
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1.402.710	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	7.901.691	
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	14.826.681	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	32.366.737	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	3 Dokumen	1.803.168	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	3 Dokumen	16.919.228	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat**	**100%**	**28.737.377.232**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**24.190.701.872**	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			waktu								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	154 Orang	28.714.377.415	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang	24.118.321.054	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	584.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.699.850	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujuian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1.022.384	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujuian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.404.236	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaa Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.095.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaa Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.902.179	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.763.313	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.272.942	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	2 Dokumen	1.752.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	5.921.812	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeriksaan								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	13.793.249	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	45.137.551	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	989.871	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.042.248	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Persentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Persentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	18.228.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	9.114.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	0 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	60 Orang	9.114.000	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peraturan Perundang-Undangan					Peraturan Perundang-Undangan			
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1.115.345.521**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.302.990	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	235.251.377	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	222.210.144	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tangerang Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	296.726.010	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	105.000.000	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	225.855.000	
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun**	**100%**	**980.965.380**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun**	**100%**	**2.838.185.917**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	453.129.101	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.215.216.78	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	105.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	527.836.279	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tangerang Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.517.969.137	
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara**	**100%**	**380.926.148**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tangerang Selatan**	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dalam setahun**	**100%**	1.475.364.744	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dalam setahun								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tangerang Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tangerang Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	103.782.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tangerang Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tangerang Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	1.097.641.944	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tangerang Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	370.826.148	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tangerang Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	263.335.800	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tangrerang Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	10.100.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tangerang Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	10.605.000	
II	**Program**	**Tangerang Selatan**	**Realisasi Total**	**100%**	**15.000.000**	**Program**	**Tangerang Selatan**	**Realisasi Total**	**100%**	**118.746.967**	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Iklim Penanaman Modal		**terhadap Target Investasi**			**Pengembangan Iklim Penanaman Modal**		**terhadap Target Investasi**			
7	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Presentase Proses Pembentukan Kebijakan Pemberian Insentif**	**100%**	**15.000.000**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Presentase Proses Pembentukan Kebijakan Pemberian Insentif**	**100%**	**41.207.512**	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Jumlah Peraturan Daerah /Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen	0	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Jumlah Peraturan Daerah /Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	37.648.169	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	15.000.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	3.559.343	
8	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Presentase dokumen penanaman modal yang disusun**	**0**	**0**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Presentase dokumen penanaman modal yang disusun**	**100%**	**77.539.455**	
	Penyusunan Rencana Umum	Tangerang Selatan	Jumlah Peraturan	0 Dokumen	0	Penyusunan Rencana Umum	Tangerang Selatan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda)	1 Dokumen	76.619.655	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	919.800	
III	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi**	**8%**	**640.000.000**	**Program Promosi Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi**	**8%**	**979.457.040**	
9	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Jumlah event promosi penanaman modal yang diselenggarakan dan diikuti**	**1 Kali**	**640.000.000**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Jumlah event promosi penanaman modal yang diselenggarakan dan diikuti**	**2 Kali**	**979.457.040**	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	640.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	964.100.340	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Tangerang Selatan	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	0 Dokumen	0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Tangerang Selatan	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	15.356.700	
IV	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**93,7%**	**138.895.620**	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**93,7%**	**699.640.767**	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Tangerang Selatan**	**Persentase perizinan dan non perizinan penanaman modal yang diterbitkan**	100%	138.895.620	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Tangerang Selatan**	**Persentase perizinan dan non perizinan penanaman modal yang diterbitkan**	100%	699.640.767	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tangerang Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	50.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tangerang Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	65.523.156	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tangerang Selatan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	320 Pelaku Usaha	88.895.620	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tangerang Selatan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	320 Pelaku Usaha	315.000.000	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Tangerang Selatan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	0 Kegiatan Usaha	0	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Tangerang Selatan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	5516 Kegiatan Usaha	319.117.611	
V	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	**100%**	**150.000.000**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	**100%**	**322.331.294**	
11	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Persentase pelaporan penanaman modal yang ditindaklanjuti**	**100%**	**150.000.000**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Persentase pelaporan penanaman modal yang ditindaklanjuti**	**100%**	**322.331.294**	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	Tangerang Selatan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi	250 Kegiatan Usaha	40.000.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	Tangerang Selatan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	250 Kegiatan Usaha	89.125.260	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	merealisasikan Kegiatan Usahanya		Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			merealisasikan Kegiatan Usahanya		merealisasikan Kegiatan Usahanya			
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Tangerang Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 Pelaku Usaha	50.000.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Tangerang Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 Pelaku Usaha	164.762.640	
	Pengawasan Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan	300 Kegiatan Usaha	60.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Tangerang Selatan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300 Kegiatan Usaha	68.443.394	

RANCANGAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Berusaha								
VI	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	100%	5.132.368	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Tangerang Selatan**	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	100%	52.500.000	
12	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Persentase Data Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang dimutakhirkan**	100%	5.132.368	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tangerang Selatan**	**Persentase Data Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang dimutakhirkan**	100%	52.500.000	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tangerang Selatan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatka	2 Dokumen	5.132.368	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tangerang Selatan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatka	2 Dokumen	52.500.000	
JUMLAH					**31.084.382.749**	**JUMLAH**				**31.992.358.702**	

Rancangan RKPD tahun 2026 yang tersaji pada Tabel 2.4 diatas merupakan telaahan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/ kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan berdasarkan rancangan RKPD. Pada rancangan RKPD pada Tabel 2.4 (pada kolom 2 s/d kolom 6), merupakan analisis rancangan program dan kegiatan dari masing-masing bagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Materi tersebut dipergunakan untuk pertemuan Forum OPD, sebagai wadah Bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan dan penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan usulan hasil Musrenbang Kecamatan untuk mengisi Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Selanjutnya, pada hasil analisi kebutuhan RKPD (pada kolom 7 s/d kolom 11) adalah penyampaian pagu hasil analisi kebutuhan RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026. Dengan adanya pagu hasil analisi kebutuhan RKPD dijadikan pedoman dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan penyusunan RKPD Tahun 2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan tahunan Kota Tangerang Selatan selain mengacu pada RPJPD dan RPJMD juga merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah melalui arah kebijakan pembangunan tahunan yang dalam perumusan dan penyusunannya melibatkan berbagai unsur masyarakat, meliputi LSM, Perguruan Tinggi, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, kelompok usaha dan DPRD. Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu

melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang dan Forum OPD tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut diatas tidak ada usulan secara khusus yang di tujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis sehingga tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak ada kegiatan yang bersumber dari usulan masyarakat.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Tangerang Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Usulan Pemangku Kepentingan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KOTA TANGERANG SELATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional jangka menengah (RPJMN) 2025-2029 bertujuan **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"**, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, adil, berdaulat, dan berdaya saing global melalui pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. Visi tersebut akan diwujudkan melalui pelaksanaan 8 (delapan) misi utama (Asta Cita), Presiden dan Wakil Presiden, berikut penjelasannya:

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM**
2. **Memantapkan pertahanan dan mendorong kemandirian bangsa** (melalui swasembada pangan, energi, air; serta pengembangan ekonomi syariah, digital, hijau, biru)
3. **Meningkatkan lapangan kerja berkualitas**, kewirausahaan, industri kreatif, serta pengembangan infrastruktur
4. **Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi**, pendidikan, kesehatan, olahraga, kesetaraan gender, serta peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. **Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA** untuk nilai tambah dalam negeri
6. **Membangun dari desa dan dari bawah** demi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan
7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi**, serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. **Memperkuat harmoni antara kehidupan sosial, lingkungan, dan budaya**, serta toleransi antarumat beragama.

Program Nasional mempunyai dua kebijakan utama yang terkait dengan kegiatan penanaman modal yaitu Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Untuk Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam mendukung program-program kebijakan utama tersebut dilakukan melalui Program Kegiatan seperti diuraikan pada Tabel 3.1 berikut ini;

Tabel 3.1
Telaahan Sinkronisasi Prioritas Nasional

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi**, termasuk pemberantasan korupsi, narkoba, judi, serta penyelundupan	Pengembangan iklim penanaman modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	DPMPTSP
			Pembuatan peta potensi kabupaten/ kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP
		Promosi penanaman modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	DPMPTSP
		Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektroni	DPMPTSP

No.	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP
				Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP
		Pengeloaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Tangerang Selatan **"TANGERANG SELATAN UNGGUL, INKLUSIF, INOVATIF, KOLABORATIF MENUJU KOTA LESTARI"** maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan mengambil Misi 2 (satu) dari 4 (empat) yang telah di tetapkan dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

"MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERKEADILAN BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH, INOVASI DAN TEKNOLOGI"

Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Rancangan Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rancangan Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2026, yaitu :

- Terwujudnya investasi daerah yang unggul.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran DPMPTSP Kota Tangerang Selatan yaitu:

1. Meningkatnya iklim investasi daerah yang kompetitif
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dan Kemudahan Investasi
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Perumusan Tujuan dan Sasaran Ranhir Renja PD Tahun 2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi	Terwujudnya investasi daerah yang unggul		Rasio Investasi Terhadap PDRB	%	7,58
		Sasaran 1 Meningkatnya iklim investasi daerah yang kompetitif	Nilai investasi PMDN dan PMA	Triliun (Rp)	9,39
		Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan dan kemudahan investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perizinan)	Indeks	90,10
			Presentase Ketepatan Waktu Perizinan Sesuai SOP	%	93,7
		Sasaran 3 Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	89,14
			Persentase Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	%	100
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Yang dimanfaatkan	Inovasi	1

3.3 Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan berpedoman pada RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis;
4. Sumber-sumber pendanaan yang ada dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan yaitu Meningkatkan Proporsi Investasi Terhadap PDRB, telah ditetapkan sasaran melalui pencapaian Meningkatnya Nilai Investasi dan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non perizinan harus dilakukan identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas seperti diuraikan pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Urusan	Target Tahun 2024	Capaian Target s.d. Tahun 2024	Perkiraan Capaian Tahun 2025 (TW.II)	Interpretasi Capaian Target Belum tercapai (<); Sesuai (=); Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)	7,44	8,48	6,47	Belum Tercapai (<)	-	Dengan di laksanakan kegiatan PENSI LKPM adalah pembinaan & asistensi laporan kegiatan penanaman modal (PENSI LKPM) bertujuan memudahkan pelaku usaha dalam melaporkan LKPM melalui sistem online single submisission (OSS) dengan cara pelaku usaha datang kekantor DPMPTSP untuk memberikan pendampingan atau asistensi dalam mengisi LKPM.
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Perizinan)	89,50	89,56	92,28	Melampaui (>)	-	Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sesuai dengan visi Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029 yaitu ***"Tangerang Selatan Unggul, Inklusif, Inovatif, Kolaboratif Menuju Kota Lestari"***, maka uraian program beserta kegiatan yang dirancang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini diarahkan pada pencapaian 4 (empat) indikator sebagai berikut:

   - Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 100%
   - Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dengan target 100%
   - Persentase Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah dengan target 100%
   - Persentase pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah dengan target 100%

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan:

      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
      - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
      - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan:

      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujuian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Realisasi Total terhadap Target Investasi dengan target sebesar 100% dengan didukung 2 kegiatan sebagai berikut:

a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi dengan target sebesar 8% dengan didukung 1 kegiatan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan sebesar 93,7% dengan didukung 1 kegiatan sebagai berikut:

a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

- Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha dengan target sebesar 100% dengan didukung 1 kegiatan sebagai berikut:

a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- Pengawasan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal dengan target sebesar 100% dengan didukung 1 kegiatan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Dari uraian tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan merencanakan 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) Sub Kegiatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 secara lebih lengkap disajikan pada tabel 3.5. Adapun kegiatan unggulan /prioritas yang akan menjadi fokus pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tahun 2026 antara lain:

Tabel 3.5
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kota Tangerang Selatan

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**18**				**Urusan Penanaman Modal**				**31.084.382.749**				**31.992.358.702**
2	**18**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**100%**	**30.135.354.761**	**Pajak Daerah**		**100%**	**29.819.682.634**
						Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
						Persentase Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah		**100%**				**100%**	
						Persentase pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah		**100%**				**100%**	
2	**18**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu**	**Tangerang Selatan**	**100%**	**36.086.001**	**Pajak Daerah**		**100%**	**181.856.580**
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	2 Dokumen	2.906.681	Pajak Daerah		2 Dokumen	19.446.882
2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tangerang Selatan	2 Dokumen	760.652	Pajak Daerah		2 Dokumen	15.803.382
2	18	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tangerang Selatan	2 Dokumen	760.652	Pajak Daerah		2 Dokumen	12.989.991
2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tangerang Selatan	1 Dokumen	672.710	Pajak Daerah		1 Dokumen	7.901.691
2	18	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	Tangerang	2	1.258.511	Pajak Daerah		2 Dokumen	15.572.534

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Perubahan DPA-SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Selatan	Dokumen					
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tangerang Selatan	5 Laporan	7.377.841	Pajak Daerah		5 Laporan	26.849.354
2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	5 Laporan	2.913.685	Pajak Daerah		5 Laporan	18.203.399
2	18	1	2.01	8	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tangerang Selatan	1 Dokumen	1.402.710	Pajak Daerah		1 Dokumen	7.901.691
2	18	1	2.01	9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	1 Data	1.402.710	Pajak Daerah		1 Data	7.901.691
2	18	1	2.01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tangerang Selatan	1 Berita Acara	14.826.681	Pajak Daerah		1 Berita Acara	32.366.737
2	18	1	2.01	11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Tangerang Selatan	3 Dokumen	1.803.168	Pajak Daerah		3 Dokumen	16.919.228
2	**18**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu**	**Tangerang Selatan**	**100%**	**28.737.377.232**	**Pajak Daerah / DAU**		**100%**	**24.190.701.872**
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tangerang Selatan	161 Orang	28.714.377.415	Pajak Daerah / DAU		161 Orang	24.118.321.054
2	18	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tangerang Selatan	1 Dokumen	584.000	Pajak Daerah		1 Dokumen	1.699.850
2	18	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujuian / Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Tangerang Selatan	1 Dokumen	1.022.384	Pajak Daerah		1 Dokumen	2.404.236

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Keuangan SKPD	SKPD							
2	18	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaa Akuntansi SKPD	Tangerang Selatan	1 Dokumen	1.095.000	Pajak Daerah		1 Dokumen	2.902.179
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tangerang Selatan	1 Laporan	3.763.313	Pajak Daerah		1 Laporan	10.272.942
2	18	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tangerang Selatan	2 Dokumen	1.752.000	Pajak Daerah		2 Dokumen	5.921.812
2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tangerang Selatan	6 Laporan	13.793.249	Pajak Daerah		6 Laporan	45.137.551
2	18	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tangerang Selatan	1 Dokumen	989.871	Pajak Daerah		1 Dokumen	4.042.248
2	**18**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**100%**	**0**	**Pajak Daerah**		**100%**	18.228.000
2	18	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	60 Orang	0	Pajak Daerah		60 Orang	9.114.000
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tangerang Selatan	60 Orang	0	Pajak Daerah		60 Orang	9.114.000
2	**18**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tangerang Selatan**	**100%**	**0**	**Pajak Daerah**		**100%**	**1.115.345.521**
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tangerang Selatan	1 Paket	0	Pajak Daerah		1 Paket	30.302.990
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tangerang Selatan	4 Paket	0	Pajak Daerah		4 Paket	235.251.377
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Tangerang Selatan	3 Paket	0	Pajak Daerah		3 Paket	222.210.144

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kantor	yang Disediakan							
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tangerang Selatan	6 Paket	0	Pajak Daerah		6 Paket	296.726.010
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tangerang Selatan	1 Dokumen	0	Pajak Daerah		1 Dokumen	105.000.000
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tangerang Selatan	1 Laporan	0	Pajak Daerah		1 Laporan	225.855.000
2	**18**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun**	**Tangerang Selatan**	**100%**	**980.965.380**	Pajak Daerah		**100%**	**2.838.185.917**
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tangerang Selatan	1 Laporan	453.129.101	Pajak Daerah		1 Laporan	1.215.216.78
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tangerang Selatan	1 Laporan	0	Pajak Daerah		1 Laporan	105.000.000
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tangerang Selatan	1 Laporan	527.836.279	Pajak Daerah		1 Laporan	1.517.969.137
2	**18**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dalam setahun**	**Tangerang Selatan**	**100%**	**380.926.148**	**Pajak Daerah**		**100%**	1.475.364.744
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tangerang Selatan	2 Unit	0	Pajak Daerah		2 Unit	103.782.000
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tangerang Selatan	36 Unit	0	Pajak Daerah		36 Unit	1.097.641.944

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tangerang Selatan	10 Unit	370.826.148	Pajak Daerah		10 Unit	263.335.800
2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Tangerang Selatan	1 Unit	10.100.000	Pajak Daerah		1 Unit	10.605.000
2	**18**	**2**			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Realisasi Total terhadap Target Investasi**	**Tangerang Selatan**	**100%**	**15.000.000**	**Pajak Daerah**		**100%**	**118.746.967**
2	**18**	**2**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Proses Pembentukan Kebijakan Pemberian Insentif**	**Tangerang Selatan**	**100%**	**15.000.000**	**Pajak Daerah**		**100%**	**41.207.512**
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah /Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tangerang Selatan	1 Dokumen	0	Pajak Daerah		1 Dokumen	37.648.169
2	18	2	2.01	3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Tangerang Selatan	1 Dokumen	15.000.000	Pajak Daerah		1 Dokumen	3.559.343
2	**18**	**2**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Presentase dokumen penanaman modal yang disusun**	Tangerang Selatan	**100%**	**0**	**Pajak Daerah**		**100%**	**77.539.455**
2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	1 Dokumen	0	Pajak Daerah		1 Dokumen	76.619.655
2	18	2	2.02	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	1 Dokumen	0	Pajak Daerah		1 Dokumen	919.800
2	**18**	**3**			**Program Promosi Penanaman Modal**	**Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi**	Tangerang Selatan	**8%**	**640.000.000**	**Pajak Daerah**		**8%**	**979.457.040**

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**18**	**3**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah event promosi penanaman modal yang diselenggarakan dan diikuti**	**Tangerang Selatan**	**2 Kali**	**640.000.000**	**Pajak Daerah**		**2 Kali**	**979.457.040**
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Tangerang Selatan	1 Dokumen	640.000.000	Pajak Daerah		2 Dokumen	964.100.340
2	18	3	2.01	3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Tangerang Selatan	1 Dokumen	0	Pajak Daerah		1 Dokumen	15.356.700
2	**18**	**4**			**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**Tangerang Selatan**	**93,70%**	**138.895.620**	**Pajak Daerah**		**93,90%**	**699.640.767**
2	**18**	**4**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase perizinan dan non perizinan penanaman modal yang diterbitkan**	**Tangerang Selatan**	**100%**	**138.895.620**	**Pajak Daerah**		**100%**	**699.640.767**
2	18	4	2.01	6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tangerang Selatan	200 Pelaku Usaha	50.000.000	Pajak Daerah		250 Pelaku Usaha	65.523.156
2	18	4	2.01	7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tangerang Selatan	320 Pelaku Usaha	88.895.620	Pajak Daerah		330 Pelaku Usaha	315.000.000
2	18	4	2.01	8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi	Tangerang Selatan	5516 Kegiatan Usaha	0	Pajak Daerah		5627 Kegiatan Usaha	319.117.611

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha							
2	**18**	**5**			**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	**Tangerang Selatan**	**100%**	**150.000.000**	**Pajak Daerah**		**100%**	**322.331.294**
2	**8**	**5**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaporan penanaman modal yang ditindaklanjuti**	**Tangerang Selatan**	**100%**	**150.000.000**	Pajak Daerah		**100%**	**322.331.294**
2	8	5	2.01	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Tangerang Selatan	250 Kegiatan Usaha	40.000.000	Pajak Daerah		280 Kegiatan Usaha	89.125.260
2	8	5	2.01	5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tangerang Selatan	200 Pelaku Usaha	50.000.000	Pajak Daerah		220 Pelaku Usaha	164.762.640
2	8	5	2.01	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Tangerang Selatan	300 Kegiatan Usaha	60.000.000	Pajak Daerah / DAK		320 Kegiatan Usaha	68.443.394
2	**18**	**6**			**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	Tangerang Selatan	**100%**	**5.132.368**	**Pajak Daerah**		**100%**	**52.500.000**

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rancana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	**18**	**6**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Data Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang dimutakhirkan**	**Tangerang Selatan**	**100%**	**5.132.368**	**Pajak Daerah**		**100%**	**52.500.000**
2	18	6	2.01	2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Tangerang Selatan	2 Dokumen	5.132.368	Pajak Daerah		2 Dokumen	52.500.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KOTA TANGERANG SELATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 serta Rancangan Renstra DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2025-2029, dalam pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan yang tertuang dalam Misi Ke 2 yaitu "Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi" yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:

   Tujuan:

   Terwujudnya investasi daerah yang unggul

   Sasaran:

   a. Meningkatnya iklim investasi daerah yang kompetitif
   b. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kemudahan investasi
   c. Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah
3. Secara khusus, dalam Renstra DPMPTSP memiliki peran dalam pencapaian sasaran pembangunan RPJMD yaitu "Meningkatnya Investasi".
4. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tanah Bumbu Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan pada tahun 2026 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kota Tangerang Selatan pada tahun 2026 adalah sebanyak 12 kegiatan, dan 47 sub Kegiatan;
3. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja DPMPTSP Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 adalah sebesar Rp.31.084.382.749,- yang bersumber dari dana APBD Kota Tangerang Selatan, dengan perincian :
   a. Rp.30.135.354.761,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin).
   b. Rp.949.027.988,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 (Pencapaian IKU-IKU Urusan-IKK Output Tahun 2026)

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2026	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	**Meningkatnya realisasi investasi daerah**	**Nilai investasi (PMDN dan PMA)**	**9,39 T (Rp)**	**Pengembangan iklim penanaman modal**			**Realisasi Total terhadap Target Investasi**	**15.000.000**		**100%**	
					Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		**Presentase Proses Pembentukan Kebijakan Pemberian Insentif**	**15.000.000**		**100%**	
						Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah /Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	FGD Perwal Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Sosialisasi Perwal Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	
						Fasilitasi Kemitraan	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha	15.000.000	Rapat Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah	1 Dokumen	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2026	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		Kabupaten/Kota		
					Pembuatan peta potensi kabupaten/kota		**Presentase dokumen penanaman modal yang disusun**	**0**		**100%**	
						Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0	Penyusunan Draft Raperwal Rencana Umum Penanaman Modal	1 Dokumen	
						Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0	FGD Peta potensi investasi	1 Dokumen	
				Program promosi penanaman modal			**Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi**	**640.000.000**		**8%**	
					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		**Jumlah event promosi penanaman modal yang diselenggarakan dan diikuti**	**640.000.000**		**1 Kali**	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2026	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(14)
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	640.000.000	Rapat Promosi daerah, Launching Apeksi, Pameran Apeksi 2026, Temu Investor	1 Dokumen	
						Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	0	Rapat Penyusunan Strategi Promosi	1 Dokumen	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	150.000.000		100%	
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		**Persentase pelaporan penanaman modal yang ditindaklanjuti**	150.000.000		100%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2026	Ket
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40.000.000	Identifikasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	250 Kegiatan Usaha	
						Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 Pelaku Usaha	
						Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	300 Kegiatan Usaha	
2	**Meningkatnya kualitas pelayanan dan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**90,10**	**Pelayanan Penanaman Modal**			**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**304.789.970**		**93,70%**	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2026	Ket
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	kemudahan investasi	**(Pelayanan Perizinan)**									
		Presentase Ketepatan Waktu Perizinan Sesuai SOP	**93,7%**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase perizinan dan non perizinan penanaman modal yang diterbitkan**	**138.895.620**		**100%**	
						Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektroni	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50.000.000	Pelayanan Keliling Penerbitan NIB Tim JOSS (Jemput Online Single Submission)	200 Pelaku Usaha	
						Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	88.895.620	ISO 9001:2015, SKM, Regulasi/ Advokasi, Pengaduan Masyarakat, Pendampingan Penilaian PTSP, Evaluasi Standar Pelayanan dan SOP	320 Pelaku Usaha	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2026	Ket
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	0	Pemantauan Kelompok Kerja Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja I, Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja II, Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja III	5516 Kegiatan Usaha	
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**5.132.368**		**100%**	
					pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/ kota		**Persentase Data Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang dimutakhirkan**	**5.132.368**		**100%**	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2026	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatka	5.132.368	Fasilitasi dan dokumentasi pmeliharaan sistem perizinan dan non perizinan	2 Dokumen	
3	**Meningkatnya kualitas tata kelola Perangkat Daerah**	**Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah**	**89,14**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**			**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**30.135.354.761**		**100%**	
							Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah			**100%**	
							Persentase Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah			**100%**	
							Persentase pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah			**100%**	
		Persentase Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat	**100%**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan, pengangguran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu**	**36.086.001**		**100%**	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2026	Ket
(1)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Daerah									
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Yang dimanfaatkan	**1 Inovasi**			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.906.681	RKT 2026, Renstra 2025-2029	2 Dokumen	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	760.652	RKA 2027, DRPK, ROK 2026	2 Dokumen	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	760.652	RKA Perubahan 2026, DRPK dan ROK Perubahan 2026	2 Dokumen	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	672.710	DPA 2027	1 Dokumen	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.258.511	Pergeseran Anggaran, DPA Perubahan 2026	2 Dokumen	
						Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	7.377.841	Laporan Bulanan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah [LPPD] Tahun 2025, LKPJ	5 Laporan	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2026	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tahun 2025, Indikator Kinerja Kunci [IKK] Tahun 2026, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah [LAKIP] Tahun 2025, Daftar Penilaian Resiko, DPR Tahun 2026, SPIP Tahun 2026, Sistem Informasi Pembangunan Daerah [SIPD], Laporan Akhir Tahun		
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.913.685	Evaluasi Kegiatan, Monev Rencana Aksi, Monev Rencana Aksi DPR, Monev Renstra, Evaluasi RENJA, Evaluasi SPIP	5 Laporan	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.402.710	Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.402.710	Pengumpulan Data Statistik Sektoral	1 Data	
						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	14.826.681	Forum OPD	1 Berita Acara	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2026	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah				
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1.803.168	Indikator Kinerja Utama [IKU] dan Penyusunan Penetapan Kinerja [2026], Indikator Kinerja Individu [IKI] Tahun 2026, Pohon Kinerja [CASCADING], Rencana Kerja Tahunan [RKT]	3 Dokumen	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu**	**28.737.377.232**		**100%**	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28.714.377.415	Gaji dan Tunjangan	161 Orang	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2026	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	584.000	Laporan Keuangan Bulanan, Rekonsiliasi SP2D, Rekonsialisasi Barang Pakai Habis dan Aset, Laporan Keuangan Semester, Laporan Pajak Semester, Laporan Daftar Transaksi Harian Semester	1 Dokumen	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.022.384	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, Penyusunan Laporan Barang Pakai Habis dan Aset SKPD Akhir Tahun, Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	
						Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaa Akuntansi SKPD	1.095.000	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggaran Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.763.313	Fasilitasi Persiapan Pemeriksaan Inspektorat, Fasilitasi Penyelesaian TLHP Inspektorat, Fasilitasi Persiapan Pemeriksaan BPK	1 Laporan	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2026	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.752.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.793.249	Fasilitasi dan Verifikasi Data Keuangan	6 Laporan	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	989.871	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**		**100%**	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Sosialisasi Peraturan Bidang Layanan Perizinan	60 Orang	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Bimbingan Teknis	60 Orang	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**0**		**100%**	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2026	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(16)
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	Alat Listrik	1 Paket	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Peralatan Kantor	4 Paket	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	Logistik Kantor	3 Paket	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	Cetakan dan Penggandaan	6 Paket	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	Bahan Bacaan Perundang-undangan	1 Dokumen	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	Rapat Konsultasi SKPD	1 Laporan	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun**	**980.965.380**		**100%**	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	453.129.101	Penyediaan Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	1 Laporan	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2026	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Air dan Listrik	Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	527.836.279	Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dalam setahun**	**380.926.148**		**100%**	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	Pajak Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	36 Unit	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Urusan	Target 2026	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pekerjaan	Rencana Target Kinerja / Volume Tahun 2026	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Dinas Operasional atau Lapangan					
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	370.826.148	Pemeliharaan Mesin	10 Unit	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	10.100.000	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit	

Tabel 4.2

Rencana Kerja Dan Pendanaan Pencapaian Fokus Pembangunan Kepala Daerah Tahun 2026

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Konsep	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tindak/Pekerjaan	Rencana Target Kinerja/ Volume Tahun 2026	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**Peningkatan pelayanan perizinan yang cepat, murah dan transparan**	**Menyediakan system perizinan yang memadai dan update**	**Pelayanan Penanaman Modal**				**93,70%**	**304.789.970**
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			**100%**	**138.895.620**
					Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektroni	Pelayanan Keliling Penerbitan NIB Tim JOSS (Jemput Online Single Submission)	200 Pelaku Usaha	50.000.000
					Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	ISO 9001:2015, SKM, Regulasi/ Advokasi, Pengaduan Masyarakat, Pendampingan Penilaian PTSP, Evaluasi Standar Pelayanan dan SOP	320 Pelaku Usaha	88.895.620
					Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang	Pemantauan Kelompok Kerja Persyaratan Dasar Perizinan	5516 Kegiatan	0

No	Fokus Pembangunan Kepala Daerah	Konsep	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tindak/Pekerjaan	Rencana Target Kinerja/ Volume Tahun 2026	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7) perizinan berusaha berbasis risiko	(8) Berusaha, Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja I, Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja II, Pemantauan Perizinan Kelompok Kerja III	(9) Usaha	(10)
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				**100%**	**5.132.368**
				pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/ kota			**100%**	**5.132.368**
					Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitasi dan dokumentasi pmeliharaan sistem perizinan dan non perizinan	2 Dokumen	5.132.368

Tabel 4.3
Rencana Kerja Dan Pendanaan Penerapan SPM Tahun 2026

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Standar Pelayanan Minimal	Jenis Pelayanan	Target Kinerja 2026	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tindak/Pekerjaan	Volume			Pagu (Rp)	Keterangan
						Kebutuhan	Eksisting	Rencana Pemenuhan Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Total Pagu									NIHIL	

Tabel 4.4
Rencana Kerja Dan Pendanaan Program Percepatan Penurunan Stunting

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tindak/Pekerjaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		
				Target 2026		Pagu (Rp.)
				Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Tabel 4.5
Rencana Kerja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Perangkat Daerah	Nama Program Penanggulangan Kemiskinan	Tujuan / Manfaat Program	Kriteria Sasaran	Individu / RT / Keluarga	Jumlah	Kebutuhan Anggaran (Rp.)	Lokasi		Renja/PPAS 2026				Ket
								Kecamatan	Kelurahan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Tabel 4.6

Rencana Kerja dan Pendanaan Program Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tindak/Pekerjaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		
				Target 2026		Pagu (Rp.)
				Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Tabel 4.7

Rencana Belanja Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2026

Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sub Kegiatan	Jenis Barang	Volume	Pengusul	Tujuan	Calon Penerima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Tangerang Selatan;
2. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029;
3. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini juga berpedoman pada RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Indikator pada sub kegiatan pada tahun 2026 mengalami perubah meyesuaikan berdasarkan Kepmendagri-050-5889, diperlukan penyesuai indikator kerja kembali dalam RENSTRA DPMPTSP 2025-2029.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2026. adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2026.

2. Berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan pembahasan bersama DPRD Kota Tangerang Selatan;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2026.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 untuk setiap triwulannya;
2. Pemetaan terhadap rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tahun 2026 dengan mengacu pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Tangerang Selatan.

Dengan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan pada Tahun Anggaran 2026.

Tangerang Selatan, Juli 2025

Kepala,
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tangerang Selatan

H. MAULANA PRAYOGA U.P, ST, MIDS
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780209 200212 1 007


KOTA TANGERANG SELATAN
CERDAS MODERN RELIGIUS